

STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA MALANG

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi publik**



DISUSUN OLEH:

ANGELINA MERICIDES

2018210108

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Keseragaman orientasi yang terjadi pada perempuan seringkali tertindas di mata publik. Kegiatan ini kemudian memunculkan pandangan perempuan yang menganggap perempuan ringkih sangat kental secara lokal. Isu kesenjangan ini sebenarnya banyak terjadi di jaringan, salah satunya Kota Malang. Di Kota Malang masih terdapat permasalahan kesenjangan orientasi terhadap perempuan, antara lain disparitas orientasi sebagai bidang kekuatan yang cukup serius, kontribusi yang sangat rendah, dan tidak sedikit perempuan yang tidak mendapatkan data dan membuka pintu di daerah. proses perbaikan. Melihat permasalahan tersebut, Bansos P3AP2KB Kota Malang menyelenggarakan penguatan ibu-ibu di Kota Malang. Motivasi di balik eksplorasi yang saya teliti ialah untuk mengetahui jenis pelaksanaan prosedur memberdayakan perempuan di kota Malang. Pemeriksaan semacam ini bersifat subjektif, titik fokus eksplorasi ialah puncak bidang penguatan perempuan, bagian atas bidang politik penguatan perempuan, puncak PKK, dan ibu rumah tangga, pemeriksaan bertujuan ialah pendekatan spesialis untuk memutuskan saksi. Hasil eksplorasi di bidang pemberdayaan perempuan, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyiapkan metodologi penguatan bagi perempuan untuk membantu perempuan melacak karakter, kapasitas sebenarnya, dan membantu perempuan hidup bebas di tengah aktivitas masyarakat. Jenis pelaksanaan metode penguatan perempuan oleh bidang penguatan perempuan ialah turun langsung ke lapangan, menyelesaikan sosialisasi, mempersiapkan, dan mengarahkan musrenbang untuk perempuan.

Kata Kunci : pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, DP3AP2KB.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tengah masyarakat masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang meluap dalam kehidupan sehari-hari. Isu kesenjangan ini masih menjadi hal yang biasa secara lokal, telah menjadi warisan genetik dan telah menjadi budaya, yang terkait dengan pandangan individu terkait perbedaan derajat antar manusia. Melihat premis ini, perempuan dan laki-laki diarahkan dalam kehidupan keluarga dan wilayah setempat. UUD 1945 jelas tidak mengenal perempuan dan laki-laki, dan menyatakan bahwa semua penduduk memiliki situasi yang sama dalam regulasi dan pemerintahan. Sebenarnya, dalam peraturan dan pedoman Indonesia, jelas tidak ada satu pun keputusan yang mengakui perempuan dan laki-laki. Lambat laun, peristiwa dan keanehan di lapangan menunjukkan bahwa dukungan perempuan Indonesia masih tertinggal di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang moneter, politik, sosial dan sosial, kesejahteraan, serta di bidang pemerintahan. . Pekerjaan wanita dalam perbaikan suatu daerah masih sangat diabaikan dan dianggap tidak sopan. Oleh karena itu, otoritas publik bergerak untuk melibatkan wanita.

Memberdayakan perempuan ialah pekerjaan yang efisien dan terorganisir untuk mencapai keadilan orientasi dalam aktivitas publik. Untuk itu dibuatlah suatu standar sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 6

Peraturan Badan Publik Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 terkait Memberdayakan perempuan.

Dalam peningkatan kekuatan wanita dalam jangka waktu singkat telah terjadi peningkatan dalam beberapa sudut pandang. Melalui penguatan perempuan, ekspansi dukungan perempuan lebih tinggi. Di mata publik, pekerjaan wanita sangat diabaikan, jadi pengaturan dibuat untuk memungkinkan wanita.

Bagaimanapun, memang masih banyak kesenjangan di mata publik yang menganggap dukungan perempuan yang dikembangkan dipandang sebagai kekecewaan. Disparitas orientasi antara perempuan dan laki-laki ialah isu kunci dalam kemajuan suatu pergantian peristiwa. *BAPPEDA Kota Malang (2020) memaklumi bahwa keanehan yang terjadi di lapangan ialah masalah keseragaman jenis kelamin, dukungan perempuan masih rendah dan agen-agen perorangan termasuk kewalahan oleh laki-laki dan perempuan. , herannya, mayoritas wanita tidak mendapatkan data dan kesempatan luar biasa untuk terlibat. sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung. Akibatnya, pekerjaan wanita yang sedang mengembangkan rencana tidak ada, pekerjaan mereka juga masih dapat diabaikan di setiap fase transformasi. (bappeda.malangkota.go.id).* Isu-isu ini sangat biasa di mata publik yang membawa orientasi korban wanita.

Melihat penggambaran isu tersebut, analis tertarik untuk meneliti penguatan perempuan. Analis tertarik melihat upaya Pemkab Malang dalam melibatkan SDM perempuan, dengan mempertimbangkan dukungan

perempuan yang sedang dikembangkan, serta orientasi darurat yang saat ini terjadi di daerah. Penelitian ini berencana untuk menganalisis tugas pemerintah dalam memberdayakan perempuan di tengah kehidupan daerah. Apa metodologi otoritas publik untuk membuat dan mengumpulkan SDM untuk wanita? Tugas otoritas publik sangat dibutuhkan dalam membina daya khayal perempuan dan lebih jauh lagi menarik perempuan, untuk mendapatkan hak-hak istimewa mereka sebagai penduduk dan tidak menjadi korban orientasi dengan laki-laki. Karena pada dasarnya SDM perempuan terbukti memiliki pilihan untuk menyaingi laki-laki. Dengan demikian, analisis bermaksud untuk melihat **Strategi Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut perumusan permasalahan dalam penelitian yang dibuat sebagai pembentuk sebuah pertanyaan : Bagaimana bentuk melaksanakan cara memberdayakan Perempuan di Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut dari tujuan masalahnya : Sebagai mengetahui bentuk melaksanakan cara memberdayakan Perempuan di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Bisa memberikan tambahan pengetahuan yang paling utama pada saat cara memberdayakan perempuan, selain itu manfaat riset berikut ialah sebagai bahan acuan menjadikan referensi pada riset selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Berkontribusi aktif dan mempunyai pengaruh untuk memproses cara memperdayakan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2003. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. Bandung : PT Alfabeta
- BAPPEDA Kota Malang. 2020. *Musrenbang Perempuan Peran Serta Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Malang*.
<https://bappeda.malangkota.go.id/web/musrenbang-perempuan-peran-serta-perempuan-dalam-perencanaan-pembangunan-kota-malang/> diakses pada 01 Desember 2021.
- Budiman, Kris. 1992. *Subordinasi Perempuan dalam Bahasa Indonesia. Dalam Citra Perempuan dan Kekuasaan (Jawa)*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Bryant, Carolie dan Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. 2004. *Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India*. *Econometrica*
- Dermawan, Hafis. 2017. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)*. Skripsi Sosiologi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Elliott, C. M. (Ed.). 2007. *Global empowerment of women: Responses to globalization and politicized religions*. Routledge.
- Hamidah, Lilih. 2021. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi Gender Di Desa Putat Wardah*. Hal. 86-87.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/9001> diakses 01 Desember 2021.
- Hardiana. 2018. *Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Skripsi Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Makasar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2538-Full_Text.pdf diakses 01 Desember 2021.
- Haryani, Ida W. 2019. *Resep Membangun Desa*. Jakarta Barat : CV Campustaka
- Hidayah, Nur. 2014. “*Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*”. Skripsi Administrasi Negara. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/655> diakses 01 Desember 2021.
- Kamus Bahasa Indonesia (KBBI). 2012-2018 <https://kbbi.lektur.id>. diakses 20 Desember 2021.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : PT Pustaka CINDESINDO.
- Kuntjara, Esther. 2001. *Gender in Javanese Indonesia. Dalam Gender Across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men*. Amsterdam/Philadelphia : John

- Benjamins Publishing Company. Vol. 1 hal. 199-228.
<https://benjamins.com/catalog/impact.9.14kun> diakses 02 Desember 2021.
- Liau, Gasper. 2015. *Administrasi Pembangunan : Studi Kajian PKL*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Marmoah, Sri. 2012. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*. Yogyakarta : Deepublish.
- Moleong. 2016. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakrya.
- Nur, Suriani. 2019. *Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*. AN NISA'. Vol. 1. 101-104.
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/388> diakses 01 Desember 2021.
- Oliver, Sandra. 2007, *Strategi Public Relations*, Jakarta, Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004 terkait Pemberdayaan Perempuan.
- Saldana, Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America : SAGE Publications.
- Saryono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Setyawan, D. dkk. 2018. *Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender*. Publisia : Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.3 No. 1. Hal. 66-71.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/2275/1428> diakses 15 Desember 2021.